

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia, (Edisi Revisi)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hadi, Soetrisno, 2001, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*, Andi Offset, Yogyakarta.
- ....., 1979, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hartini, Sri et all, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Malayu, Hasibuan, S.P., 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- ....., 1993, *Manajemen dan Sumber Daya Manusia (Dasar dan Kunci Keberhasilan)*, CV. Haji Massagung, Jakarta.
- Marsono, 1974, *Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian*, Ikhtiar Baru, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 1998, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.
- ....., 1982, *Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, Liberty, Yogyakarta.
- Nainggolan, 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Pertja, Jakarta.
- Nitisemito, Alex S., 1996. *Manajemen Personalia*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Pramusinto, Agus, 2009, *Mengembangkan Budaya Kepemimpinan Profesional Birokrasi*, Gava Media, Yogyakarta.
- Pudja Pramana KA, 2009, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satoto, Sukamto, 2004, *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, HK Offset, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang, P., 1996, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

- ....., 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Syafiie, H. Inu Kencana, 2004, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tim Penelitian KHN, 2006, *Dasar-dasar Pembentukan Sistem dan Mekanisme Penegakan Etik dan Disiplin PNS Indonesia*, KHN Republik Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3808).

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong di Instansi Pemerintah.

### C. Karya ilmiah

Ngadiran, 2010, “Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengangkatan Pejabat Struktural di Pemerintah Gunung Kidul”, *Tesis*, Magister Hukum Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Trihatmoko, Puguh, 2013, “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam perspektif Hukum Kepegawaian”, *Tesis*, Magister Hukum Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### D. Kamus

W.J.S., Poerwadarmita, 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

### E. Internet

Arnil Dedy Djara, “Self Promotion Lewat Promosi Terbuka, Berani?” *Timor Express*, dimuat pada tanggal 23 Mei 2015, <http://www.timorexpress.com/opini/self-promotion-lewat-promosi-terbuka-berani>.

<http://news.detik.com/berita/2861768/kepala-bkd-tidak-kuat-banyak-pns-dki-eselon-iv-pilih-mundur>, diakses pada tanggal 3 Juni 2015.

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/03/31/nm2bxv-pemprov-copot-pejabat-dki-yang-terlibat-korupsi-ups>, akses pada tanggal 3 Juni 2015.

Definisi Pekerjaan Profesi Jabatan dan Karir, <http://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/>, diakses pada tanggal 7 November 2014.

Miftah Toha, Aparatur Sipil Negara, <http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/1445-aparatur-sipil-negara>, diakses pada tanggal 5 Mei 2015.

N. Krisbiyanto, “Sejarah Panjang Permasalahan PNS”, <http://www.portalhr.com/komunitas/opini/sejarah-panjang-permasalahan-pns/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2015.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Promosi Jabatan, bukan Lelang Jabatan, <http://www.menpan.go.id/berita->



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**IMPLIKASI PROMOSI JABATAN SECARA TERBUKA TERHADAP MANAJEMEN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI INDONESIA**

RATIH ROHANI, Joko Setiono, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

terkini/1801-promosi-terbuka-bukan-lelang-jabatan, diakses pada tanggal  
17 April 2015.